Dinas PMD
Kabupaten Kebumen

Rencana Kerja Tahun 2025

\

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadlirat Alloh SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorog partisipasi masyarakat. Dokumen ini memberikan gambaran tentang hubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan sebagai awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 serta aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten kebumen tahun 2025 mencakup 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan termasuk didalamnya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Kami menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan tim penyusun, sehingga dokumen Rencana Kerja ini masih memerlukan penyempurnaan. Untuk itu, sumbang saran demi penyempurnaannya sangat kami perlukan. Sehingga dokumen ini dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya guna mewujudkan kemandirian desa dan keberdayaan masyarakat.

Demikian, semoga Alloh SWT. senantiasa menyertai kita semua dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebumen, 11 Juli 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN

COKRO AMINOTO, S.IP, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19661129 198702 1 004

Demikian, semoga Alloh SWT. senantiasa menyertai kita semua dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebumen, 11 Juli 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN

COKRO AMINOTO, S.IP, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19661129 198702 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR LAMPIRAN iv

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 3

B. Landasan Hukum 2

C. Maksud dan Tujuan 6

D. Sistematika Penulisan 7

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 9

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis. 9

B. Analisi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 33

D. Review Usulan Program dan Kegiatan PD 38

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 55

BAB III. TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN..... 59

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 59

B. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PMD Kabupaten Kebumen 60

C. Program dan Kegiatan 64

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....68

BAB V PENUTUP 71

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 (Evaluasi Program Tahun Anggaran 2023)
2. Tabel 2.2 (Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Jangka Menengah)
3. Tabel 2.3 (Capaian Pengukuran Kinerja Tahunan)
4. Tabel 2.4 (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Dinas PMD Kabupaten Kebumen)
5. Tabel 2.5 (Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen)
6. Tabel 2.6 (Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
7. Tabel 2.7 (Daftar Pengusul dan Usulan Pada Acara Forum OPD Dinas PMD Tahun 2024 (Penyusunan RKPD Tahun 2025
8. Tabel 3.1 (Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025)
9. Tabel 3.2 (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025)

DAFTAR LAMPIRAN

1. Tabel Renja Tahun 2024 (Hasil Entry SIPD);
2. Berita Acara Forum Perangkat Daerah 2024 beserta lampirannya;
3. Daftar Hadir Forum Perangkat Daerah 2024;
4. Notulen Forum Perangkat Daerah 2024;
5. Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024;
6. Berita Acara Hasil Penilaian Klasifikasi BUMDESA Tahun 2023
7. Rekapitulasi Penilaian Perkembangan BUM Desa Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025 selanjutnya disingkat Renja Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan ke-4 dari rangkaian rencana jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kebumen Tahun 2021-2026.

Renja Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dispermades Kabupaten Kebumen, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Dispermades Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 serta memperhatikan Rencana Kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun 2025 yang temanya adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 harus menjamin keterkaitan dan konsistensi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PMD Kabupaten Kebumen pada APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2025. Renja ini disusun melalui 4 (empat) tahapan, yaitu penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, perumusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, bottom-up, politis, dan top-down. Pendekatan teknokratis dilakukan dengan menggunakan kerangka berfikir ilmiah dari internal satuan kerja atau OPD, termasuk melalui proses konsultasi dan verifikasi dari TAPD Kabupaten. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan sesuai Tupoksi Dispermades, utamanya melalui mekanisme Forum Perangkat Daerah dan bottom-up dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa (Musrenbangdes), Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Proses politis, melalui akomodasi atas pokok-pokok pikian DPRD. Proses top-down yaitu merujuk pada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Penyusunan Renja Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 selanjutnya disinergiskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan tetap memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dengan kewenangan yang diberikan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dispermades Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan:

1. Pedoman bagi Dinas PMD Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen tahun 2023 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lemb ran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas PMD Kabupaten Kebumen tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang mendukung tema pembangunan Kabupaten Kebumen yang diusung dalam RKPD tahun 2025, yaitu “Pemantapan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Peningkatan sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Sedangkan tujuan dari Renja Dinas PMD Kabupaten Kebumen tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis Dinas PMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah

antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;

3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah, provinsi maupun nasional;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun dengan sistematika sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang (SOT Perangkat Daerah dan Tupoksi), Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisikan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 Dimas PMD Kabupaten Kebumen selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis.

Sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Kebumen mendukung 2 (dua) prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yakni :

1. Penerapan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi melalui *eGoverment* dan peningkatan kapabilitas aparatur
2. Pemulihan kapasitas ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi lokal
   berbasis komoditas unggulan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 dengan anggaran belanja sebesar Rp. 9.086.197.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Barang Jasa) Rp. 9.084.877.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp.1.320.000,- Dengan realisasi anggaran seluruhnya sebesar Rp. 8.865.207.724,- atau 97,57% dengan perincian Belanja Operasi sebesar Rp. 8.864.035.724,- atau 97,55% dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.172.000,- atau 0,01%. Dari anggaran belanja kegiatan tersebut, antara lain untuk mendukung pencapaian Indiktor Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah atau IKU OPD di tahun 2023.

Adapun rincian dari Program Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Program Tahun Anggaran 2023

PROGRAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
		Rp	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.259.591.000	4.058.351.633	95,28

Program Penataan Desa	31.000.000	30.927.000	99.76
Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.871.496.000	1.860.451.568	99,41
Program Administrasi Pemerintahan Desa	797.147.000	795.728.947	99,82
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.126.963.000	2.119.726.076	99,66

Evaluasi Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET	REALISASI	
		%	ANGGARAN	%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.000.000	100,00	15.796.300	98,73
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000	100,00	8.9832.300	99,80
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.750.518.000	100,00	3.562.241.829	94,98
Pelaksanan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifkasi Keuangan SKPD	27.879.000	100,00	27.814.400	99,77
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.557.000	100,00	6.553.500	99,95
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	100,00	39.982.000	99,96
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.000.000	100,00	12.998.000	99,98
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.236.000	100,00	1.236.000	100
Penyediaan Bahan/ Material	27.000.000	100,00	26.932.100	99,75
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.000.000	100,00	42.916.500	99,81

SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET	REALISASI	
		%	ANGGARAN	%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.080.000	100,00	7.047.000	99,82
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.648.000	100,00	1.424.500	89,81
Penyediaan Jasa Ko-munikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.000.000	100,00	73.999.920	91,36
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.400.000	100,00	60.389.800	99,98
Penyediaan Jasa Pe-meliharaan, Biaya Pe-meliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.253.000	100,00	105.917.684	95,85
Pemelharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.040.000	100,00	50.574.000	99,09
Pemeliharaan Mebel	8.000.000	100	8.000.000	100
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status desa	31.000.000	100	30.927.000	99,76
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	27.000.000	100,00	26.915.090	99,30
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1.744.496.000	100,00	1.733.686.890	99,38
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	100.000.000	100,00	99.849.588	98,85
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pe-merintah Desa	100.000.000	100,00	99.961.858	99,96
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	20,000.000	100,00	19.978.125	99,89

SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET	REALISASI	
		%	ANGGARAN	%
Pembangunan Desa				
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	72.000.000	100,00	71.873.000	99,82
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	82.464.000	100,00	82.329.600	99,84
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	18.000.000	100,00	17.928.700	99,60
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sana antar desa	40.000.000	100,00	39.977.400	99,94
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	135.000.000	100,00	134.565.100	99,68
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	14.000.000	100,00	13.756.000	98,26
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	98.683.000	100,00	98.666.532	99,98
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	68.000.000	100,00	67.889.320	99,84
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	35.000.000	100,00	34.936.900	99,82
Pelaksanaan Penugas-an Urusan/Kewenang-an Kabupaten / Kota yang Dilaksanakanan oleh Desa	144.000.000	100,00	113.865.412	99,88
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kema-syarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna),	85.000.000	100,00	84.671.200	99,61

SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET	REALISASI	
		%	ANGGARAN	%
Lemba-ga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pen-dapatan Asli Desa	15.636.000	100,00	15.563.300	99,54
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfatan Teknologi Tepat Guna	11.000.000	100,00	10.945.000	99,50
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	55.327.000	100,00	55.266.300	99,89
Fasilitasi Tim Peng-gerak PKK dalam Pe-nyelenggaraan Gerak-an Pemberdayaan Ma-syarakat dan Kesejah-teraan Keluarga	1.960.000.000	100,00	1.953.280.276	99,66
JUMLAH	**9.086.197.000**	**100**	**8.865.207.724**	**97,57**

Capaian Kinerja Organisasi

a. Pengukuran Kinerja Jangka Menengah

Capaian Kinerja Jangka Menengah atau capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2016, yang dilakukandengan cara membandingkan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dengan Target Indikator Indikator Kinerja Tahun 2026.

Perincian selengkapnya mengenai Capaian Kinerja Jangka Menengah berikut Indikator Kinerja yang berhasil diwujudkab oeh Dinas PMD Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian
1	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Katagori Maju dan Mandiri	Meningkatnya Kemandirian Desa	42,09%	71,49	169,85

b. Pengukuran Kinerja Tahunan

Pengukuran capaian kinerja sasaran Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi

Indikator Kinerja Utama dengan target pada Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Perincian selengkapnya mengenai Capaian Indikator Kinerja Utama berikut Indikator Kinerja Utama yang berhasil diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kebumen serta dalam mewujudkan Visi Misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Pengukuran Kinerja Tahunan

No	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian
1	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Katagori Maju dan Mandiri	Meningkatnya Kemandirian Desa	29,17 %	71,49 %	245,08%

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dan pencapaian Renstra Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sampai tahun 2024 adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

TABEL :2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Kebumen

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan n-1)		Catatan
					Target Renja PD tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11	12
1	**Program Penataan Desa**	**Prosentase desa tertata**	8,91	0,66	2	2	100	4,90	7,56	84,85	)
1.1	*Kegiatan Penyelenggaraan Penataan desa*	*Jumlah kegiatan penyusunan Perda Penataan Desa dan jumlah kegiatan Perubahan Perda Pilkades*	2	2	2	5	250	2	2	450	
1.1.1	Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Perda Penataan Desa yang tersusun dan Jumlah perubahan Perda/Perbup Pilkades serta Junlah Perbup Penegasan Batas Desa yang tersusun	3	2	2	5	250	2	2	450	
2	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Cakupan Fasilitasi Kerjasama desa**	100	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan n-1)		Catatan
					Target Renja PD tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11	12
2.1	*Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa*	*Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa*	3	3	3	3	100	3	3	100	
2.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi kerjasama antar desa	35	7	7	449	6.414	7	463	1.323	
2.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang terfasilitasi TMMD, Karya Bakti dan Kerjasama Desa dengan pihak Ketiga	10	10	10	10	100	10	10	100	
2.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang terfasilitasi kawasan perdesaan dan desa yang mendapat fasilitasi program keberlanjutan pengembangan potensi	48	34	22	22	100	22	22	100	
3	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah BUMDesa yang meningkat Klasifikasinya**	89	46	56	56	100	67	67	75,21	
3.1	*Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	*Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	13	12	12	12	100	13	13	100	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan n-1)		Catatan
					Target Renja PD tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11	12
3.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pendampingan KPMD, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan Tenaga Ahli	449	449	449	449	100	449	449	100	
3.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi penyusunan produk hukum	30	0	0	0	0	26	26	86,67	
3.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Des	Jumlah Desa/Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes	449 desa, 11 kelurahan	26	26	26	100	449	449	100	
3.1.4	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengelolaan keuangan desa (APBDes, APBDes Perubahan)	449	449	449	449	100	449	449	100	
3.1.5	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitass Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Bimtek Aparatur Pemerintah Desa	3.930	130	78	78	100	78	286	7,28	
3.1.6	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Kecamatan yang mendapat fasilitasi pelaksanaan Musdes	26	26	26	26	100	26	26	100	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan n-1)		Catatan
					Target Renja PD tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11	12
3.1.7	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dam Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesa yang meningkat klasifikasinya	10	9	10	10	100	10	10	100	
3.1.8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	449	5	1	1	100	49	51	11,36	
3.1.9	Sub Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	1	1	1	100	1	1	100	
3.1.10	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan SID Desa online dan IDM	449	130	200	200	100	449	779	173	
3.1.11	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang mendapatkan Fasilitasi pengadaan aset desa	449	52	52	52	100	449	553	123,16	
3.1.12	Sub Kegiatan Pembinaan Pening-katan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah BPD yang mengikuti Bimtek aparatur pemerintahan desa	1.926	130	130	130	100	78	338	17,55	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan n-1)		Catatan
					Target Renja PD tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11	12
3.1.13	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi Bantuan Keuangan provinsi, Bantuan keuangan Kabupaten dan bantuan keuangan lainnya (DD,ADD,BPJS KS, BHR/BHP)	449	449	449	449	100	449	449	100	
4.	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Prosentase PKK Desa/Kel Tertib Administrasi**	24,35	13,04	15,87	15,87	100	18,70	18,70	76,80	
4.1	*Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan*	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Masyarakat	5	5	5	5	100	5	5	100	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan n-1)		Catatan
					Target Renja PD tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11	12
	Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi									
4.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitasi Pemberdayaan LKD (RT, RW, Karang Taruna, Posyandu, PKK dan LPMD)	250	50	50	50	100	50	150	60	
4.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah pasar desa yang dibina	100	20	20	44	220	20	84	84	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan n-1)		Catatan
					Target Renja PD tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11	12
4.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam PemanfaatanTekno-logi Tepat Guna	Jumlah Posyantekdes yang dibentuk	10	2	2	3	150	2	7	70	
4.1.4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan BBGRM	449	449	449	449	100	449	449	100	
4.1.5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP.PKK desa/kelurahan yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	487	487	487	487	100	487	487	100	
5.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.1	*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun*	45	10	10	10	100	9	29	64	
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	4	3	3	100	3	10	33,33	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan n-1)		Catatan
					Target Renja PD tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11	12
	Perangkat Daerah										
5.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan data perangkat daerah yang tersusun	6	6	6	6	100	6	6	100	
5.2	*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah bulan admkinistrasi keuangan perangkat daerah*	60	12	12	12	100	12	36	60	
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	37	37	37	37	100	31	37	100	
5.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8	8	8	8	100	8	8	100	
5.3	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah bulan Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	60	12	0	0	0	0	12	20	
5.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	255	51	0	0	0	0	51	20	
5.4	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah bulan Penyediaan Administrasi Umum*	60	12	12	12	100	12	36	60	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan n-1)		Catatan
					Target Renja PD tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11	12
		Perangkat Daerah									
5.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7	7	7	7	100	7	7	100	
5.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan logistic n bahan logistic kantor	60	12	12	12	100	12	36	60	
5.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60	12	12	12	100	12	36	60	
5.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan enyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	12	12	12	100	12	36	60	
5.4.5	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	60	12	12	12	100	12	36	600	
5.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360	64	74	74	100	74	212	58,89	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan n-1)		Catatan
					Target Renja PD tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11	12
5.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penyediaan penatausahaan arsip dinamis SKPD	60	12	12	12	100	12	36	60	
5.5	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah*	*Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	98	15	15	15	100	18	48	48,98	
5.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralaltan gedung kantor	16	4	0	0	100	6	10	62,50	
5.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnnya	82	11	0	0	100	12	23	28,05	
5.6	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah bulan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor*	60	12	12	12	100	12	36	60	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan n-1)		Catatan
					Target Renja PD tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11	12
5.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	60	12	12	12	100	12	36	60	
5.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	60	12	12	12	100	12	36	60	
5.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	60	12	12	12	100	12	36	60	
5.7	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah bulan penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	60	12	12	12	100	12	36	60	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan n-1)		Catatan
					Target Renja PD tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11	12
5.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	130	26	26	26	100	26	78	60	
5.7.2	Pemeloiharaan Mebel	Jumlah unit mebel yang terpelihara	125	25	25	25	100	25	75	60	
5.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250	50	50	50	100	60	160	64	
5.7.4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Penyediaan jasa pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1	1	0	0	100	2	3	300	

Sumber : Renstra Dinas PMD Tahun 2021-2026

Dari **Tabel 2.4** di atas dapat disimpulkan bahwa pada realisasi tahun 2023 kegiatan yang mencapai target kinerja yang ditetapkan dan kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Sub Kegiatan Yang Tidak Mencapai Target Kinerja**

   Dari 5 Program 9 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang dilaksanaan oleh Dinas PMD Kabupaten Kebumen ***tidak ada*** Sub Kegiatan Yang Tidak Mencapai Target Kinerja.

2. **Sub Kegiatan Yang Mencapai Target Kinerja**

   Dari 5 Program 9 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang dilaksanaan oleh Dinas PMD Kabupaten Kebumen ***34*** Sub Kegiatan Yang Mencapai Target Kinerja. Hal tersebut dikarenakan sebagai upaya percepatan untuk memenuhi target tahun sebelumnya yang sempat terkendala dikarenakan pandemi covid 19 sehingga berimbas pada penganggaran.

3. **Sub Kegiatan Yang Melebihi Taget Kinerja**

   Selain itu dari 5 Program 9 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PMD Kabupaten Kebumen ada yang Melebihi Target Kinerja antara lain :

   a. Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa capaiannya melebihi target kinerja karena adanya kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan adanya regulasi di daerah sehingga komitmen Pemda dan Desa antusias dalam melaksanakan hal tersebut.

   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota capainya melebihi target kinerja karena adanya penambahan jumlah desa yang melaksnanakan kerjasama antar desa Pembentukan kawasan pertanian (13 desa) dan terbitnya Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap UPK eks PNPM-MPd wajib bertransformasi ke BUM Desa Bersama berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 dan Permendes PDTT Nomor 15 Tahun 2021

   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna capainya melebihi target kinerja karena Keterlambatan dalam pembentukan posyantekdes di Kebumen, menjadikan pemicu dan semangan untuk membetuk Posyantekdes bagi desa yang memiliki embrio teknologi tepat guna.

d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa capainya melebihi target kinerja karena dilatar belakangi dengan kemauan para pengelola Pasar Desa untuk meningkatkan PAD dan makin banyak pasar Desa yang ingin berkembang sehingga Pemda Kabupaten maupun Provinsi memberikan pembinaan, pendampingan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen telah melaksanakan 5 program, 9 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen adalah Capaian Kinerja Program, dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 100%. Uraian capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen selama tahun 2023 adalah sebagaimana tabel :

Tabel 2.5
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD (%)				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025*	Tahun 2026	
	IKK Output :											
1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		√	7	7	7	7	449	449	449	447	
2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		√	7	7	7	7	232	217	7	7	
3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas		√	78	78	70	70	449	449	70	70	
	IKK Outcome											
1	Persentase		√	0	0	0	0	0	0	0	0	Sudah tuntas

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD (%)				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025*	Tahun 2026	
	pengentasan desa tertinggal											ditahun 2022
2	Persentase peningkatan status desa mandiri		√	5,66	7,43	6,47	6,92	95,31	150,98			
	Indikator Program											
1	Cakupan pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Prosentase Desa Tertata			2	4,90	6,90	8,91	2	4,90	6,90	8,91	
3	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa			100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah BUMDesa yang Meningkat Klasifikasinya			56	67	78	89	56	67	78	89	
5	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi			15,87	18,70	21,52	24,52	15,87	18,70	21,52	24,87	

Dari Tabel 2.5. (Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen) tersebu di atas dapat diketahui antara lain :

1. Capaian Indikator Kinerja (IKK) Output
   ~~a)~~ Pada tahun 2023 dan 2024 ditargetkan sebanyak 7 desa yang mendapat fasilitasi kerjasama antar desa dan terealisasi sebanyak 449 desa atau sebesar 6,414%. Tahun 2025 dan 2026 ditagetkan sebanyak 7 desa dan proyeksi capaian sebanyak 449 desa atau sebesar 6,414%.
   b) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas, pada tahun 2023 dan 2024 ditargetkan sebanyak 70 lembaga atau sebesar 100% yang terdiri dari RT, RW, Posyandu, PKK dan Karangtaruna.
2. Capaian Indikator Kinerja (IKK) Outcome

   Prosentase pengentasan desa tertinggal, dengan rumus jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2023 Nihil (0) Peningkatan status desa mandiri, dengan rumus jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri tahun sebelumnya dikurangi jumlah desa berkembang tahun n, dibagi jumlah desa berkembang pada tahun n. Pada tahun 2022 sebanyak 336 desa berkembang, tahun 2023 sebanyak 318 desa berkembang sehingga target tahun 2023 sebanyak 18 desa atau 5,66%. Tahun 2024 sebanyak 296 desa berkembang, target Tahun 2024 sebanyak 22 desa atau 7,43, tahun 2025 sebanyak 278 desa berkembang, target tahun 2024 sebanyak 18 desa. Realisasi Tahun 2023 sebanyak 128 desa atau 95,31 % dan tahun 2025 sebanyak 51 desa atau 150,98%.
3. Capaian Indikator Kinerja Program
   a) Program Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, merupakan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang bersifat rutin dan persediaan (kesekretariatan) untuk mendukung pelayanan kinerja Dispermades termasuk Gaji ASN di tahun 2023 sampai dengan 2024 ditargetkan sebanyak 100% tercapai.

~~b)~~ Prosentase Desa Tertata sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk menetapkan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen. Target Tahun 2022 untuk menyusun Perda Penetapan desa di Prosentase Desa Tertata sebagai tindak lanjut amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menetapkan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen yaitu 0,22 % atau jumlah perda dan perbub penataan desa yang terbit / jumlah perda an perbub penataan desa yang dibutuhkan x 100% (1/449 desa x 100%). Untuk Tahun 2023 ditargetkan sebanyak 2 % atau sebanyak 9 Perpub Penetapan Desa yang tersusun. Tahun 2024 ditargetkan 4,90%. Dan Tahun 2024 di targetkan 4,90%.

c) Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa, pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 100%, dengan rumus jumlah kawasan perdesaan yang difasilitasi / jumlah kawasan perdesaan x 100%.

d) Program Administrasi Pemerintahan Desa Rumus : jumlah BUM Desa yang meningkat klasifikasinya dari tahun 2020 sampai tahun n.

Klasifikasi BUM Desa pada tahun 2023 yaitu sebanyak 77 BUM Desa Dasar, 304 BUM Desa Tumbuh, 51 BUM Desa Berkembang dan 17 BUM Desa Maju. Pada Tahun 2023 BUMDesa yang meningkat klasifikasinya sebanyak 56 BUM Desa yang meningkat klasifikasinya atau bertambah sebanyak 10 BUM Desa menjadi 56 BUMDesa yang meningkat klasifikasinya dan pada Tahun 2024 ditagetkan penambahan BUMDesa yang meningkat klasifikasinya sejumlah 11 lembaga.

e) Program Prosentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Rumus : jumlah PKK desa dan kelurahan tertib administrasi/jumlah PKK desa dan kelurahan x 100%.

Tahun 2022 sebanyak 13,04% atau sebanyak 60 desa/kelurahan yang sudah tertib administrasinya (60/460x100%), tahun 2023 sebanyak 15,87% atau bertambah sebanyak 2,83% desa/kelurahan yang sudah tertib administrasinya (73/460x100%) dan pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 18,70% atau bertambah sebanyak 2,83% desa/kelurahan yang sudah tertib administrasinya (86/460x100%).

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan kinerja aparatur, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar Perangkat Daerah, dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat serta dengan pihak lain seperti LSM, pihak swasta (CSR) serta dengan melibatkan masyarakat desa itu sendiri.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana dan program di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan kerjasama desa, bidang administrasi,
2. aparatur dan kelembagaan desa, bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
3. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan kerjasama desa, bidang administrasi, aparatur dan kelembagaan desa, bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa;

4. pelaksanaan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan kerjasama desa, bidang administrasi, aparatur dan kelembagaan desa, bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
5. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan kerjasama desa, bidang administrasi, aparatur dan kelembagaan desa, bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
6. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan kerjasama desa, bidang administrasi, aparatur dan kelembagaan desa, bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
7. pelaksanaan administrasi Dinas;
8. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kebumen berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan pada tahun 2023. Isu penting disusun berdasarkan hasil evaluasi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Beberapa permasalahan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, di antaranya :

1. Masih minimnya status desa maju dan mandiri.

   Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

   Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi atau lingkungan menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Indeks Desa Membangun sekaligus dapat memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Kriteria Indeks Desa Membangun terdapat 54 indikator sebagaimana disebutkan pada lampiran Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. Pencapaian IDM di Kabupaten Kebumen masih rendah, hal tersebut ditunjukkan bahwa Data IDM Kabupaten Kebumen tahun 2023 dari 449 desa terdapat 60 Desa berstatus Desa Mandiri, 261 Desa berstatus Maju, 128 Desa berstatus Berkembang, Pada Tahun 2024 dari 449 desa terdapat 152 Desa berstatus Desa Mandiri, 246 Desa berstatus Maju, 51 Desa berstatus Berkembang.. Oleh karena itu perlu upaya dan kerjasama serta dukungan dari para stakeholder dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kebumen. Dampak klasifikasi IDM yang masih rendah akan berimbas pada besaran Dana Desa di Kabupaten Kebumen, yang merupakan indikator penerimaan Dana Desa dan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten kebumen masih tinggi. Program dan anggaran pemerintah yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan serta peran serta masyarakat untuk menggali potensi sumberdaya wilayah merupakan peluang yang sangat mendukung.
2. Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa.

Untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan adanya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah desa. Capaian kinerja kegiatan tersebut Pada periode Renstra tahun 2021-2026 ditargetkan sebanyak 5.856 orang dari seluruh jumlah aparatur pemerintah desa dan BPD). Pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 1.396 orang dan telah terealisasi sebanyak 208 orang yang mengikuti pelatihan. Tahun 2024 telah ditagetkan 1.396 orang.

Dengan capaian kinerja di bawah target Renstra tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya data pengaduan yang terlaporkan dan sudah ditangani oleh Tim Pengaduan Dnas PMD Kabupaten Kebumen. Pada Tahun 2023 sudah mencapai 8 kasus yang terlaporkan. Selain itu, muncul beberapa pengaduan permasalahan tentang kondisi internal perangkat desa yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap aturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan permasalahan paska Pilkades.

Apabila kualitas pemahaman tupoksi perangkat desa dan kualitas pelayanan pemerintah desa dalam pelayanan publik masih rendah akan berdampak pada kondusifitas desa, pelaksanaan program dan kegiatan di desa kurang maksimal dan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa juga rendah.

Dengan adanya upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tupoksinya merupakan peluang, sehingga para aparatur pemerintah desa dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai tupoksi masing-masing dan akan dapat meminimalisir permasalahan internal perangkat desa.

3. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk memberdayakan masyarakat dan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya peran Lembaga Kemasyarakatan (LKD) sangat diperlukan. Hal ini disebabkan

karena Lembaga Kemasyarakatan Desa kurang mendapatkan peran dari pemerintah desa, antara lain dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa.

Sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nommor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan

Pelayanan masyarakat Desa, yang terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Pada tahun 2023 jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kabupaten Kebumen sebanyak 12.325 lembaga, yang terdiri dari RT sebanyak 7.198 lembaga, RW sebanyak 2.029 lembaga, PKK sebanyak 460 lembaga, Karangtaruna sebanyak 460 lembaga dan Posyandu sebanyak 2.178. Dari lembaga tersebut yang sudah mendapat pelatihan atau peningkatan kapasitas SDM pada tahun 2023 sebanyak 569 lembaga.

Sehingga dari tahun 2023 jumlah LKD yang sudah mendapatkan pelatihan atau peningkatan kapasitas SDM yaitu sebanyak 569 lembaga atau sebanyak 4,62% dari jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada di Kabupaten Kebumen. Apabila peran Lembaga Kemasyarakatan Desa belum optimal akan mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dukungan pemerintah terhadap LKD sebagai mitra aparatur pemerintah di desa, antara lain melalui regulasi terkait LKD, yaitu Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan serta anggaran untuk peningkatan kapasitas sumberdaya LKD guna meningkatkan perannya dalam pembangunan.

Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja dan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di depan, maka isu-isu

strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengelolaan pemerintahan desa, yang didukung oleh tertib administrasi, perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai ketentuan, pemantapan regulasi di desa, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah desa dan sarana prasarana pendukung kinerja.
2. Pemenuhan SDGs Desa antara lain :
   a) Pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan yang berbasis sumberdaya yang dimiliki.
   b) Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (BUM Desa, Pasar Desa).
   c) Pengembangan produk unggulan lokal dalam upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial.
   d) Peningkatan peran dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
   e) Peningkatan parsisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pembangunan desa.
3. Perwujudan desa mandiri, melalui 3 dimensi :
   1) Dimensi Sosial
   2) Dimensi Ketahanan Ekonomi
   3) Dimensi Lingkungan

   Untuk mewujudkan desa mandiri tersebut diperlukan adanya integrasi dan sinergitas program dan kegiatan lintas OPD serta pemanfaatan dana-dana desa sesuai kewenangannya
4. Penguatan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis Daerah, terutama untuk pemulihan ekonomi nasional/daerah dan pencegahan Covid-19.

D. Review Usulan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah

Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal serta menjadi pedoman dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah sewajarnya apabila

kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara kebutuhan dan keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, perlu dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Tema pembangunan daerah tahun 2025 adalah "Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia".

Isu strategis pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas;
2. Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif;
3. Kesejahteraan ekonomi masyarakat;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6. kondusivitas wilayah dan kemampuan adaptasi dan mitigasi bencana; dan
7. Peningkatan nilai budaya masyarakat.

Berdasarkan isu-isu strategis pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 selanjutnya dirinci ke dalam 5 (lima) prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dilakukan melalui upaya:
   a) Peningkatan tata kelola organisasi dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan;
   b) Penerapan merit system dalam rangka peningkatan manajemen sumber daya aparatur pemerintah;
   c) Optimalisasi pengendalian pembangunan, pengelolaan dan analisis data serta pengembangan riset dan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan;
   d) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah; serta

e) Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang andal dan terintegrasi dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saingdan produktif, dilakukan melalui upaya:
   a) Peningkatan mutu dan layanan kesehatan dan implementasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
   b) Peningkatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan gizi masyarakat;
   c) Peningkatan akses layanan pendidikan inklusif dan penerapan penjaminan mutu pendidikan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pendidikan; serta
   d) Peningkatan pengarusutamaan gender serta perlindu dungan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan Kebumen layak anak.
3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dilakukan melalui upaya:
   a) Pengembangan komoditas unggulan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian;
   b) Peningkatan skala ekonomi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor industri;
   c) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor jasa;
   d) Pengembangan keanekaragaman budaya, hayati dan geologi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat
   e) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam rangka pengendalian harga;
   f) Peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
   g) Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan serta optimalisasi pemanfaatan lahan pangan lestari dalam rangka penguatan ketahanan pangan; dan
   h) Peningkatan kolaborasi lintas Perangkat Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
4. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, dilakukan melalui upaya:

a) Pengembangan sistem dan jaringan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi;
b) Optimalisasi sistem jaringan air bersih perpipaan dalam rangka peningkatan layanan air bersih;
c) Pengembangan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh perkotaan dalam rangk ka peningkatan kualitas hunian masyarakat;
d) Peningkatan upaya konservasi dalam rangka pelestarian lingkungan; dan
e) Penataan Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan persampahan serta limbah dalam rangka meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat, dilakukan melalui upaya:
   a) penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini;
   b) peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilkades serentak tahun 2025 dalam rangka penguatan demokrasi;

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan, kinerja pencapaian target Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan prioritas program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ada untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pada Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 menyesuaikan Peraturam Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Dinas PMD Kabupaten Kebumen dapat juga dilihat pada table 2.6 berikut ini :

T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2025)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Renstra)					KETERANGAN
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				13.484.251.040,00					13.626.406.640,00	
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase Desa Tertata	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	6,90 %	35.000.000,00	PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase Desa Tertata	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	4,90 %	35.000.000,00	
1.1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Kegiatan Penyusunan Perda penataan desa dan Jumlah Kegiatan perubahan Perda Pilkades	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	2 Kegiatan	35.000.000,00	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Kegiatan Penyusunan Perda penataan desa dan Jumlah Kegiatan perubahan Perda Pilkades	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	2 Kegiatan	35.000.000,00	
I.1.1	Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	1 Desa	35.000.000,00	Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	66 Desa	35.000.000,00	
2.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	100%	1.059.008.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	100%	1.174.981.600,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2025)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Renstra)					KETERANGAN
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.1	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	3 kegiatan	1.0059.008.000,00	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	3 kegiatan	1.174.991.600,00	
2.1.1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	7 Dokumen	22.512.000,00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	7 Dokumen	22.512.000,00	
2.1.2	Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	11 Dokumen	991.496.000,00	Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	11 Dokumen	1.107.4790.000,00	
2.1.3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	22 Dokumen	45.000.000,00	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	22 Dokumen	45.000.000,00	
III.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Bumdes yang Meningkat Klasifikasinya	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	78 lembaga	6.832.516.000,00	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	Jumlah Bumdes yang Meningkat Klasifikasinya	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	78 lembaga	6.858.648.000,00	
3.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	13 kegiatan	6.832.516.000,00	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Dinass PMD Kabupaten Kebumen	13 kegiatan	6.858.648.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2025)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Renstra)					KETERANGAN
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	449 Dokumen	70.000.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMDKabupaten Kebumen	449 Dokumen	70.000.000,00	
3.1.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	30 Dokumen	12.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	30 Dokumen	12.000.000,00	
3.1.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	449 Dokumen	36.045.000,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	449 Dokumen	36.045.000	
3.1.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	449 Dokumen	95.080.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	449 Dokumen	95.080.000,00	
3.1.5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	400 Orang	129.292.000,00	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	400 orang	129.292.000,00	
3.1.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	26 Laporan	9.875.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	26 Laporan	9.875.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2025)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Renstra)					KETERANGAN
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.1.7	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desadan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	10 Dokumen	35.000.000,00	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	10 Dokumen	35.000.000,00	
3.1.8	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	400 Laporan	492.210.000,00	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	400 Laporan	492.210.000,00	
3.1.9	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	1 laporan	39.328.000,00	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	1 laporan	39.328.000,00	
3.1.10	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	449 Dokumen	88.531.000,00	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dinas PMDKabupaten Kebumen	449 Dokumen	114.663.000,00	
3.1.11	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	449 Dokumen	50.813.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	449 Dokumen	50.813.000,00	
3.1.12	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yangMengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Dnas PMD Kabupaten Kebumen	400 Orang	222.61200,00	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	400 Orang	222.612.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2025)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Renstra)					KETERANGAN
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.1.13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	449 Dokumen	5.551.730.000,00	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	449 Dokumen	5.551.730.000,00	
IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	21,52 %	1.168.990.000,00	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	21,52%	1.168.990.000,00	
4.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	5 Kegiatan	1.168.990.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum	Dispermades Kabupaten Kebumen	5 Kegiatan	1.168.000.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2025)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Renstra)					KETERANGAN
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupatem/kota	Adat yang Sama dalam Daerah Kabupatem/kota yang terfasilitaso				yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupatem/kota	Adat yang Sama dalam Daerah Kabupatem/kota yang terfasilitasi				
4.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	50 Lembaga	73.534.000,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	50 Lembaga	73.534.000,00	
4.1.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	20 Dokumen	23.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	20 Dokumen	23.000.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2025)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Renstra)					KETERANGAN
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Pendapatan Asli Desa				Pendapatan Asli Desa	Pendapatan Asli Desa				
4.1.3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	2 Laporan	21.830.000,00	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	2 Laporan	21.830.000,00	
4.1.4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	449 Laporan	50.626.000,00	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	449 Laporan	50.626.626.000,00	
4.1.5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	487 Dokumen	1.000.000.000,00	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	13 Dokumen	1.000.000.000,00	
V.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	100%	4.388.777.040,00	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen	Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	100%	4.388.777.040,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2025)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Renstra)					KETERANGAN
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
5.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	9 dokumen	47.394.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	9 dokumen	47.394.000,00	
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	3 Dokumen	38.406.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	3 Dokumen	38.406.000,00	
5.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	6 Laporan	8.988.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	6 Laporan	8.988.00,00	
5.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 bulan	3.792.756.040,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Dinas PMDKabupaten Kebumen	12 bulan	3.792.758.040,00	
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	30 Orang/bulan	3.771.875.040,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	30 Orang/bulan	3.771.875.040,00	
5.2.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	8 Dokumen	20.883.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	8 Dokumen	20.883.000,00	
5.3	Administrasi Umum Perangkat	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 bulan	107.875.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 bulan	107.875.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2025)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Renstra)					KETERANGAN
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Daerah	Perangkat Daerah					Perangkat Daerah				
5.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	7 paket	6.557.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	7 paket	6.557.000,00	
5.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 Paket	36.070.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 Paket	36.070.000,00	
5.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 Paket	10.750.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 Paket	10.750.000,00	
5.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 Dokumen	2.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 Dokumen	2.000.000,0	
5.3.5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 Paket	25.998.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 Paket	25.998.000,00	
5.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	74 Laporan	25.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	74 Laporan	25.000.000,00	
5.3.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 Dokumen	1.500.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 Dokumen	1.500.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2025)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Renstra)					KETERANGAN
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Dinamis pada SKPD					Dinamis pada SKPD				
5.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 bulan	162.331.000,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 bulan	162.331.000,00	
5.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 Laporan	1.700.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 Laporan	1.700.000,00	
5.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 Laporan	80.206.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 Laporan	80.206.000,00	
5.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 Laporan	80.425.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dnas PMD Kabupaten Kebumen	12 Laporan	80.425.000,00	
5.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Dispermades Kabupaten Kebumen	12 bulan	178.419.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Dispermades Kabupaten Kebumen	12 bulan	178.419.000,00	
5.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	26 Unit	107.419.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	26 Unit	107.419.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2025)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Renstra)					KETERANGAN
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapanganyang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapanganyang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
5.5.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dina PMD Kabupaten Kebumen	25 Unit	6.000.000,00	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	25 Unit	6.000.000,00	
5.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	50 Unit	30.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	50 Unit	30.000.000,00	
5.5.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	1 unit	35.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	1 unit	35.000.000,00	
5.6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 bulan	45.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 bulan	45.000.000,00	
5.6.1	Bimbingan Teknis Implentasi peraturan perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	51 Orang	45.000.000,00	Bimbingan Teknis Implentasi peraturan perundang undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan*	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	51 Orang	45.000.000,00	
5.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah unit pengadaanbarang milik daerah penunjang utusan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	9 unit	55.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	umlah unit pengadaanbarang milik daerah penunjang utusan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	9 unit	55.000.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2025)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Renstra)					KETERANGAN
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Urusan Pemerintah Daerah	pemerintah daerah				Urusan Pemerintah Daerah	pemerintah daerah				
5.7.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang utusan pemerintah daerah	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	3 unit	30.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang utusan pemerintah daerah	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	3 unit	30.000.000,00	
5.7.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	6 unit	25.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	6 unit	25.000.000,00	

Berdasarkan tabel di atas disampaikan indikator, target, program, sub kegiatan, kegiatan, program serta pendanaan yang direncanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen pada tahun 2025. Beberapa sub kegiatan yang baru dilaksankan antara lain Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa. Sub kegiatan tersebut baru dilaksanakan mulai tahun 2022 dengan target yaitu jumlah Perda Penataan Desa yang tersusun dan jumlah perubahan Perda Pilkades yang tersusun sebanyak 2 Dokumen. Pada Renja Tahun 2025 pelaksanaan kegiatan pelatihan atau Bimtek, selain dari unsur desa juga akan melibatkan atau mengikutsertakan unsur kecamatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran kecamatan sebagai pembina dan pengawas pemerintahan desa. Selain unsur kecamatan juga akan melibatkan unsur Pendamping Desa (PD) yang mempunyai misi untuk melaksanakan pendampingan dalam memberdayakan desa menjadi desa yang kuat, mandiri dan demokratis. Beberapa pelatihan yang akan dilaksanakan, antara lain Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa, BPD, pelatihan SID, Indeks Desa Membangun (IDM), Bimtek Siskeudes, Bimtek Pengelolaan Aset Desa. Selanjutnya untuk meningkatkan lembaga ekonomi di desa pada tahun 2025 dilaksanakan sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa dengan indikator jumlah BUMDesa yang meningkat klasifikasinya dari tumbuh menjadi berkembang dan berkembang menjadi maju, target sebanyak 78 BUMDesa.

Selain tersebut di atas pada Tabel Renja Dinas Pemberdayaan Masyaraat dan Desa Tahun 2025 terdapat beberapa indikator program yang direncanakan dan sub kegiatan serta pendanaan yang direncanakan, antara lain sebagai berikut :

1) Indikator Program Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, merupakan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang bersifat rutin dan persediaan (kesekretariatan) untuk mendukung pelayanan kinerja Dispermades termasuk Gaji ASN di tahun 2025 ditargetkan sebanyak 100% tercapai.
2) Prosentase Desa Tertata

   sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk menetapkan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2025 ditargetkan untuk menyusun Perda Penetapan Desa di Kabupaten Kebumen sebanyak 6.90% atau jumlah perda dan perbub penataan desa yang terbit / jumlah perda dan perbub penataan desa yang dibutuhkan x 100% (1/449 desa x100%).

3) Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa, pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 100%, dengan rumus jumlah kawasan perdesaan yang difasilitasi / jumlah kawasan perdesaan x 100%.

Target tersebut berkaitan dengan fasilitasi kawasan perdesaan yang sudah terbentuk sejak tahun 2016, yaitu sebanyak 5 kawasan, yaitu yaitu kawasan wisata pantai, kawasan gula semut, kawasan batik, kawasan ayaman pandan dan kawasan peternakan sapi terpadu pada 22 desa di Kabupaten kebumen, yaitu kawasan wisata pantai, kawasan gula semut, kawasan batik, kawasan ayaman pandan dan kawasan peternakan sapi terpadu. Selanjutnya mulai tahun 2022 ditargetkan untuk memfasilitasi sebanyak 22 desa di 5 kawasan tersebut untuk pengembangannya. Pada Tahun 2023 rintisan pembentukan kawasan perdesaan baru yaitu Kawasan Pertanian yang berlokasi di Kec. Mirit, dan pada Tahun 2024 Pembentukan Kawasan Perdesaan Baru yaitu Kawasan Pertanian.

4) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Rumus : jumlah BUM Desa yang meningkat klasifikasinya dari tahun 2020 sampai tahun n. Klasifikasi BUM Desa pada tahun 2020 yaitu sebanyak 186 BUM Desa Dasar, 236 BUM Desa Maju, 17 BUM Desa Berkembang dan sebanyak 2 BUM Desa Maju. Pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 40 BUMDesa yang meningkat klasifikasinya atau bertambah sebanyak 30 dari tahun 2020. Tahun 2022 bertambah 6 BUMDesa menjadi 46 BUMDesa yang meningkan klasifikasinya. Pada Tahun 2025 ditagetkan penambahan BUMDesa yang meningkat klasifikasinya sejumlah 78 lembaga.

5) Program Prosentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi

Rumus : jumlah PKK desa dan kelurahan tertib administrasi/jumlah PKK desa dan kelurahan x 100%.

Pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 13,04 % atau sebanyak 60 desa/kelurahan yang sudah tertib administrasinya (60/460x100%).

Pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 15,87% atau bertambah sebanyak 2,83% desa/kelurahan yang sudah tertib administrasinya (73/460x100).

Pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 18,70% atau bertambah sebanyak 2,83% desa / kelurahan yang sudah tertib administrasi (86/460x100)

Pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 21,52% atau bertambah sebanyak 2,82% desa / kelurahan yang sudah tertib administrasi (99/460x100)

E. Penelaahan Usulan

Rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025 telah didiskusikan dalam Forum OPD yang tujuannya adalah melakukan penyelarasan rumusan rancangan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan. Kemudian dalam Forum

OPD yang dilaksanakan oleh Dinas PMD, terdapat beberapa usulan, oleh peserta forum OPD baik dari masyarakat, LSM, Perguruan dan OPD terkait, antara lain :

1. Universitas Putra Bangsa (Akhmad Syarifudin) :
   - Standar miskin yang dimaksud seperti apa ?
   - Apa terobosan dan aksinya Dinas PMD Kabupaten Kebumen untuk peningkatan perekonomian ?
   - Inovasi Desmeli perlu dicermati lagi karena data di BPS buta huruf di Kebumen masih tinggi.
2. Paguyuban Rekso Projo (Imdad Durohman, SE)
   - Anggakas untuk Dinas PMD masih kurang
   - Kebutuhan SDM Dinas PMD masih kurang
   - Untuk penyusunan daraf Perbup/ Perda agar melibatkan Desa.
   - Program di Dinas PMD kurang “Berasa” karena kurang melibatkan desa.
   - Peningkatan Kapasitas/Bimtek agar diubah supaya lebih berasa dab tepat sasaran.
   - Apakah Dinas PMD mempunya Peta masalah/ Risiko di Desa.
   - Komitmen Kepala Desa agar Kepala Dinas lebih menggandeng Desa untuk memajukan dan lebih peduli kepada Desa.
   - Kegaitan TTG dan BBGRM jangan hanya seremonial saja. Karena dampaknya untuk Desa besar terutama untuk Kerjasama di Desa.
3. Forkom BPD (Zen Kholik)
   - BPD dan Kades seharusnya dilibatkan dalam penyusunan Perbup/Perda
4. Forum BUMDESMA (Nurfuadi Salim)
   - Agar difisalitasi permodalan dan pelatihan/ peningkatan kapasitas bagi perangkat desa.

Tabel 2.7.
Daftar Pengusul dan Usulan Pada Acara Forum Perangkat Daerah Dinas PMD Tahun 2024 (Penyusunan RKPD Tahun 2025)

No.	Pengusul	Usulan	Tanggapan	Keterangan
1.	Akhmad Syarifudin (Universitas Putra Bangsa)	- Standar Miskin yang dimaksud seperti apa. - Apa terobosan dan aksi nyata Dinas PMD untuk peningkatan perekonomian. - Inovasi Desmeli perlu dicermati	- Tagline Bangga Melayani Desa sering didengungkan di Dinas PMD, silaturhami dan komunikasi juga	Tanggapan oleh : Kepala Dinas PMD Kab. Kebumen (Cokro Aminoto, S.IP, M.Kes)

		lagi karena data di BPS buta huruf di Kebumen masih tinggi.	dilakukan sehingga melampuai target kinerja, harapan kedepannya lebih koordinatif dab komunikatif lagi, dengan disediakan ruang pertemuan bagi Reksoprojo atau yang mau memanfaatkan seperi Forum BPD, PPDI maupun BUMDesa dan disediakan pula Inovasi Kopi Dinding yang peruntukkan bagi para perangkat desa yang konsultasi atau tamu dan juga bagi karyawan dan karyawati yang sumber anggarannya dari internal karyawan dan karyawati Dinas PMD atau	
2.	Paguyuban Rekso Projo (Imdad Durohman, SE)	- Anggakas untuk Dinas PMD masih kurang - Kebutuhan SDM Dinas PMD masih kurang - Untuk penyusunan daraf Perbup/ Perda agar melibatkan Desa. - Program di Dinas PMD kurang “Berasa” karena kurang melibatkan desa. - Peningkatan Kapasitas/Bimtek agar diubah supaya lebih berasa dab tepat sasaran. - Apakah Dinas PMD mempunya Peta masalah/ Risiko di Desa. - Komitmen Kepala Desa agar Kepala Dinas lebih menggandeng Desa untuk memajukan dan lebih peduli kepada Desa. - Kegaitan TTG dan BBGRM jangan hanya seremonial saja. Karena dampaknya untuk Desa besar terutama untuk Kerjasama di Desa.		
3.	Forkom BPD (Zen Kholik)	BPD dan Kades seharusnya dilibatkan dalam penyusunan Perbup/Perda Agar difisalitasi		

4.	Forum BUMDESMA (Nurfuadi Salim)	permodalan dan pelatihan/ peningkatan kapasitas bagi perangkat desa.	pengunjung Kantin DPW. - Ucapan terima kasih disampaikan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Kebumen kepada seluruh peserta yang hadir atas masukan dansharring nya, kedepannya akan lebih komunikatif dan koordinatof daalm melaksanakan progran dan melibatkan unsur Kades, Perangkat Desa dan Forum Terkait dalam Penyusunan Perda/Perbup, yang dalam waktu dekat akab membahas Perda Asusila yang akan dilaksankan pada tanggal 28 Pebruari 2024	

BAB III
TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan nasional dan provinsi yang terkait dan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mulai tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut, kewenangan pemerintah daerah terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang semula adalah urusan wajib menjadi urusan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan tersebut tentu berpengaruh terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Perubahan yang lebih strategis dan penting untuk diperhatikan dan diantisipasi adalah perubahan tugas pokok dan fungsi serta bentuk kelembagaan Dinas PMD. Terkait hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus mengikuti peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian kewenangan urusan, struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah, serta pengelolaan keuangan daerah terkait kode rekening belanja program dan kegiatan urusan pembedayaan masyarakat dan desa. Demikian juga dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sangat berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

Selanjutnya, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada dibawah tiga (2) kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Adapun Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Rancangan Renstranya tahun 2020-2024 sesuai dengan Visi Misi dan Tupoksi Dispermades adalah:

a. Berkembangnya status pembangunan desa, dengan indikator yaitu jumlah desa mandiri, jumlah desa berkembang dan jumlah desa tertinggal.
b. Jumlah Bumdes berkembang dan jumlah Bumdes maju

Pada tahun 2021 pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah Satu Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Bab XVI Ketentuan lain-lain, Pasal 73 Ayat 1 Menyebutkan Bahwa pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi BUMDesa bersama (BUMDesma).

Selain hal tersebut pada tahun 2020 telah dicanangkan program SDGs Desa oleh Kementerian Desa dan Daearah Tertinggal. (Sustainable Development Goals disingkat SDGs) Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Terdapat 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs desa yaitu : 1. Desa tanpa kemiskinan, 2. Desa tanpa kelaparan, 3. Desa sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan desa berkualitas, 5. Desa berkesetaraan gender, 6. Desa layak air bersih dan sanitasi, 7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan, 8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, 9. Inovasi dan infrastruktur desa, 10. Desa tanpa kesenjangan, 11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, 13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa, 14. Ekosistem laut desa, 15. Ekosistem daratan desa, 16.Desa damai dan berkeadilan, 17. Kemitraan untuk pembangunan desa, dan 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Oleh karena itu, mulai tahun 2021 penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa dalam menghadapi pandemi Covid 19.

Adapun SDGs Desa sesuai Tupoksi Dispermades, antara lain :

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
3. Inovasi dan infrastruktur desa
4. Desa tanpa kesenjangan
5. Desa damai dan berkeadilan
6. Kemitraan untuk pembangunan desa
7. Kelembagaan desa dinamis dan budaya dan adaptif

B. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PMD Kabupaten Kebumen

Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan semua unsur masyarakat dalam rangka mencapai visi dan misi Daerah. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026

adalah “Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mendukung Misi ke-3, yaitu Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen sesuai Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025, tema pembangunan tahun 2025 adalah “Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia”.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas;
2. Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif;
3. Kesejahteraan ekonomi masyarakat;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6. kondusivitas wilayah dan kemampuan adaptasi dan mitigasi bencana; dan
7. Peningkatan nilai budaya masyarakat.

Berdasarkan isu-isu strategis pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 selanjutnya dirinci ke dalam 5 (lima) prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dilakukan melalui upaya:
   a) Peningkatan tata kelola organisasi dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan;
   b) Penerapan merit system dalam rangka peningkatan manajemen sumber daya aparatur pemerintah;
   c) Optimalisasi pengendalian pembangunan, pengelolaan dan analisis data serta pengembangan riset dan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan;
   d) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah; serta

e) Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang andal dan terintegrasi dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saingdan produktif, dilakukan melalui upaya:
   a). Peningkatan mutu dan layanan kesehatan dan implementasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
   b). Peningkatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan gizi masyarakat;
   c). Peningkatan akses layanan pendidikan inklusif dan penerapan penjaminan mutu pendidikan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pendidikan; serta
   c) Peningkatan pengarusutamaan gender serta perlindu dungan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan Kebumen layak anak.
3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dilakukan melalui upaya:
   a). Pengembangan komoditas unggulan dalam rangka meningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian;
   b). Peningkatan skala ekonomi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor industri;
   c). Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor jasa;
   d). Pengembangan keanekaragaman budaya, hayati dan geologi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat
   e). Peningkatan efisiensi perdagangan dalam rangka pengendalian harga;
   f). Peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
   g). Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan serta optimalisasi pemanfaatan lahan pangan lestari dalam rangka penguatan ketahanan pangan; dan
   h) Peningkatan kolaborasi lintas Perangkat Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
4. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, dilakukan melalui upaya:
   a). Pengembangan sistem dan jaringan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi;
   b) Optimalisasi sistem jaringan air bersih perpipaan dalam rangka peningkatan layanan air bersih;

c). Pengembangan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hunian masyarakat;

d). Peningkatan upaya konservasi dalam rangka pelestarian lingkungan; dan

f). Penataan Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan persampahan serta limbah dalam rangka meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat, dilakukan melalui upaya:

a). penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini;

b). peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilkades serentak tahun 2025 dalam rangka penguatan demokrasi;

c). penguatan kapasitas Desa Tangguh Bencana dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan bencana; dan d) pengembangan dan pelestarian budaya dalam rangka peningkatan optimalisasi nilai-nilai budaya masyarakat.

Agar tugas tersebut berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi yang lebih baik, dan lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten), swasta, dan masyarakat luas (termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi). Koordinasi itu dilakukan mulai dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, koordinasi dalam rangka fasilitasi pencarian sumber-sumber pendanaan serta koordinasi dalam hal evaluasi, pengendalian pelaksanaan dan pengembangan maupun pelestarian hasil-hasil pembangunan.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, tujuan dan sasaran rencana kerja tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2025
Mewujudkan peningkatan ekonomi di sektor sekunder		PDRB ADHK Sektor Sekunder	7.101,00 milyar rupiah

	Meningkatnya kemandirian Desa	Prosentase desa dengan Indeks Desa Mambangun katagori maju dan mandiri	38,08

C. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang melaksanakan tugas terkait pemberdayaan masyarakat dan desa dituntut untuk memberdayakan masyarakat desa dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa guna memberikan pelayanan yang berkualitas terutama kepada masyarakat desa. Pada dasarnya kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesannya.

Secara lebih lengkap mengenai program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025 mempunyai 5 program, 11 kegiatan dan 43 sub kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 3.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1	Program Penataan Desa	1	Penyelenggaraan Penataan Desa	1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
				2	Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga
				3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
				2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
				4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
				6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
				7	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
				8	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
				9	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
				10	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
				11	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
				12	Pembimaan Peningkatan Kapasitas BPD
				13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
4	Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan masyarakat Hukum Adat	1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				2	Fasilitasi Pengembangan

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
					Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				3	Fasilitasi Pemerintah Dresa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
				5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				5	Penyediaan Bahan/Material
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
			Pemerintahan Daerah		
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				2	Pemeliharaan Mebel
				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Bimbingan Teknis Implentasi peraturan perundang undangan
		7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja ini.

Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja dan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di depan, maka program dan kegiatan serta sub kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a). Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1). Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2). Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1). Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2). Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
   c). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      1). Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
   d). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1). Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
      2). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      3). Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      4). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
      5). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
      6). Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      7). Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   e). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      2). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   f). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2). Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

3). Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4). Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

g). Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2). Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Penataan Desa

a) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

1) Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa

III. Program Peningkatan Kerjasama Desa

a) Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

IV. Program Administrasi Pemerintahan Desa

a) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

3) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

5) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

6) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa

7) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

9) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

10) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

11) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
12) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
13) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan oleh Desa

V. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

a). Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
4) Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
5) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), serta tetap memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Kebumen dan Rencana Strategis)

Dalam rangka pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025 perlu menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua program, baik dalam kerangka “regulasi” maupun dalam kerangka anggaran” (budget intervention), harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar sub kegiatan, antar kegiatan maupun antar program, serta antar satu instansi maupun antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Kabupaten Kebumen yang sejahtera membangun desa merupakan langkah utama agar Kabupaten Kebumen bisa menurunkan angka kemiskinan. Karena dengan membangun 449 desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Kebumen berarti membangun hampir seluruh wilayah Kebumen. Salah satu isu yang sangat strategis sekaligus sebagai indikator keberhasilan dalam pembangunan desa adalah peningkatan status kemandirian desa yang dibangun dari 3 indeks komposit yaitu indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan yang membagi desa dalam 5 status desa yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Untuk mewujudkan kemandirian desa maka Dispermades tidak dapat bekerja sendiri, tetapi membutuhkan kerjasama dan sinergi program antar OPD dan stake holder lainnya.

Belum optimalnya pengelolaan ekonomi desa merupakan isu strategis yang perlu didorong untuk memandirikan desa. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga ekonomi yang harus diperhatikan dan dikembangkan oleh desa tentu keberadaannya harus didukung oleh pemerintah

kabupaten. Peningkatan kapasitas kelembagaan BUM Desa masih menjadi permasalahan utama. Meskipun penyertaan modal sudah diberikan oleh APBDes namun pengembangan BUM Desa belum sesuai harapan.

Untuk menunjang kemandirian desa, maka kondusifitas desa harus terjaga dan pelayanan publik di desa perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu masih rendahnya kwalitas penyelenggaraan desa dan pelayanan publik di desa merupakan tantangan untuk terus diupayakan langkah-langkah strategis melalui program dan kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan desa yang berkulitas pula dan output yang sesuai harapan. Partisipasi dari masyarakat desa sendiri dan motivasi serta semangat untuk memandirikan desa juga menjadi hal penting dalam proses kemandirian desa. Oleh karena itu dalam setiap penyusunan rencana pembangunan baik di tingkat Kabupaten maupun desa agar bisa memprioritaskan program dan kegiatan untuk memandirikan desa dengan mencermati indeks komposit yang perlu diintervensi.

Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari seluruh elemen pemerintah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan daerah sangat diperlukan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Kebumen, 11 Juli 2024

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN

COKRO AMINOTO, S.IP, M.Kes
Pembina TK. I
NIP. 19661129 198702 1 004

kabupaten. Peningkatan kapasitas kelembagaan BUM Desa masih menjadi permasalahan utama. Meskipun penyertaan modal sudah diberikan oleh APBDes namun pengembangan BUM Desa belum sesuai harapan.

Untuk menunjang kemandirian desa, maka kondusifitas desa harus terjaga dan pelayanan publik di desa perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu masih rendahnya kwalitas penyelenggaraan desa dan pelayanan publik di desa merupakan tantangan untuk terus diupayakan langkah-langkah strategis melalui program dan kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan desa yang berkulitas pula dan output yang sesuai harapan. Partisipasi dari masyarakat desa sendiri dan motivasi serta semangat untuk memandirikan desa juga menjadi hal penting dalam proses kemandirian desa. Oleh karena itu dalam setiap penyusunan rencana pembangunan baik di tingkat Kabupaten maupun desa agar bisa memprioritaskan program dan kegiatan untuk memandirikan desa dengan mencermati indeks komposit yang perlu diintervensi.

Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari seluruh elemen pemerintah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan daerah sangat diperlukan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Kebumen, 11 Juli 2024

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN

COKRO AMINOTO, S.IP, M.Kes
Pembina TK. I
NIP. 19680129 198702 1 004